

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN
WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Skripsi)

**Oleh:
RARA ARIFA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE TIMELINESS OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING

By

RARA ARIFA

This research was conducted empirically test the effect of the independent variable on the dependent variable. In this study, with the aim of examining the effect of local government age, level of local financial independence, local government location, local government size and audit opinion on the timeliness of local government financial reporting. The population in this research is all the province/district/city in Indonesia. The number of research samples was 2710 samples obtained from all provinces/districts/cities in Indonesia. The data source is obtained from the financial reports of local governments in Indonesia for 2015-2019. The data analysis method used is logistic regression analysis with SPSS 26 software application. The conclusion of this study is that the variables of local government age, level of regional financial independence, local government location and audit opinion have a positive effect on the timeliness of local government financial reporting, while the variable size of local government has no effect on the timeliness of local government financial reporting.

Keywords: *Age, Level of Financial Independence, Location, Size, Audit Opinion*

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh

RARA ARIFA

Penelitian ini dilakukan secara empiris menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk menguji pengaruh usia pemerintah daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, lokasi pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah dan opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah sampel penelitian sebanyak 2710 sampel yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tahun 2015-2019. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi logistik dengan aplikasi *software* SPSS 26. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel usia pemerintah daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, lokasi pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Usia, Tingkat Kemandirian Keuangan, Lokasi, Ukuran, Opini Audit

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN
WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Oleh
RARA ARIFA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG**

2022

Judul Skripsi

: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

Nama Mahasiswa

: **Rara Arifa**

Nomor Pokok Mahasiswa

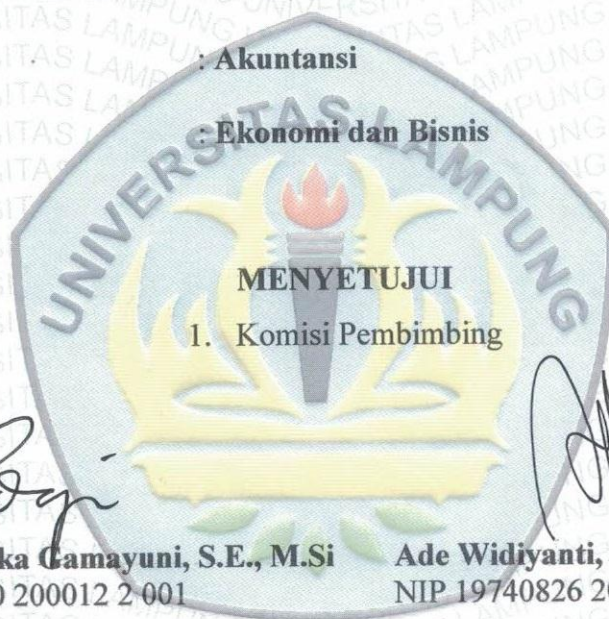
: **1711031121**

Jurusan

: **Akuntansi**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Rindu Rika Camayuni, S.E., M.Si
NIP 19750620 200012 2 001

Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA
NIP 19740826 200812 2 002


2. **Ketua Jurusan Akuntansi**

Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si.
NIP 197510262002122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

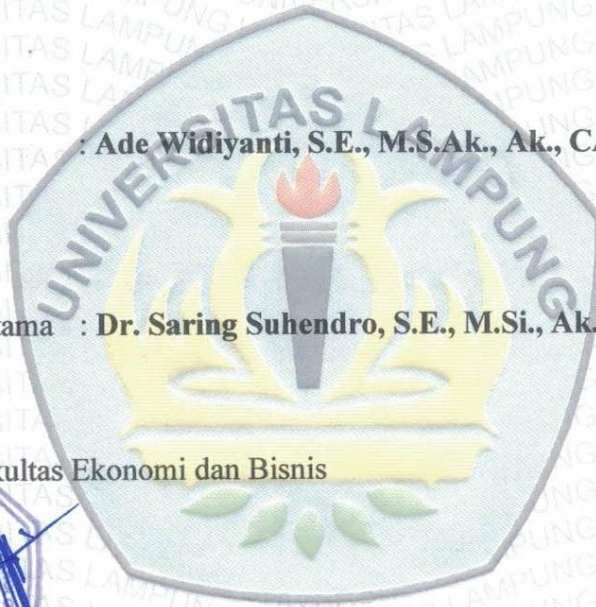
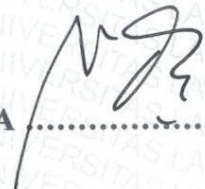
Ketua : **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**



Sekretaris : **Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.**



Penguji Utama : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 April 2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rara Arifa

NPM : 1711031121

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah benar hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan menjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarisme*. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini adalah benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 27 April 2022



Rara Arifa

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandarlampung pada tanggal 20 April 1998, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Rohayun Dahrhun dan Iffah Risfalida, BA.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis antara lain :

1. TK Diniyyah Putri Lampung yang telah diselesaikan pada tahun 2003.
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Sukarame Bandarlampung yang telah diselesaikan pada tahun 2010.
3. SMPN 5 Bandarlampung yang telah diselesaikan pada tahun 2013.
4. SMAN 14 Bandarlampung yang telah diselesaikan pada tahun 2016.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan segala kerendahan hati, kemurahan dan ridho Allah SWT kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta tulus kepada:

Kedua orangtua ku tercinta

Papi Rohayun dan juga Mami Iffah Risfalida BA, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, cinta dan kasih sayang nya yang tak terhingga untukku. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Untuk adik-adikku

Anis Tsanya dan Muhammad Fakhri Akbar, yang selalu mendukungku, agar kelak aku menjadi orang yang sukses dan membuatku berusaha menjadi teladan yang baik.

Seluruh Keluarga dan Sahabat-sahabat terbaikku

Yang selalu ada dan setia menemani, memberikan dukungan dan semangat, terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini.

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

MOTTO

“ Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil
tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna “

Albert Einstein

“ ALLAH tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai
dengan kesanggupannya “

Q.S Al Baqarah : 286

*“ I don't have the right. I should just keep on doing what
i'm good at “*

BTS

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Laporan akhir berjudul **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Utama. Terimakasih banyak telah memberikan bimbingan, nasihat dan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA selaku Pembimbing Kedua. Terimakasih banyak atas kesediaannya memberikan waktu, bimbingan dan nasihat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Saring Suhendro., S.E., M.Si., Ak., CA selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasihat selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Seluruh Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas seluruh bantuan dan pelayanan terbaik selama proses perkuliahan selama ini.
9. Yang tercinta untuk kedua orangtua ku, Papi Rohayun dan Mami Iffah Risfalida, BA yang telah memberikan dukungan, do'a, dan pengorbanan demi keberhasilanku. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya.
10. Adik-adikku Anis Tsanya dan Muhammad Fakhri Akbar yang memberikan ku dukungan dan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh keluargaku yang tidak dapat kusebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala *support* dan kata-kata yang memotivasiku untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Sahabat-sahabatku sedari SMA yang kusayangi "*Orang Kaya*" Ichut, Gendut dan Jupri yang selalu memberi semangat dalam menyusun skripsi ini. Semoga di masa depan kelak nama grup kita bisa jadi kenyataan.

13. Teman-teman *Tukang Ngeluh* yang selalu menemani keseharian ku dan berjuang bersama selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Sandhika, Dellya, Ice, dan Nanda.
14. Terimakasih kepada siapapun yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan studi dan penyelesaian skripsi ini.
15. Almamater Universitas Lampung.

Semoga bantuan dan dukungan serta semangat yang diberikan dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandarlampung, 27 April 2022

Penulis

Rara Arifa

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 <i>Agency Theory</i> dalam Pemerintahan Daerah	8
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	9
2.2 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	13
2.2.1 Usia Pemerintah Daerah.....	15
2.2.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	15
2.2.3 Lokasi Pemerintah Daerah	16
2.2.4 Ukuran Pemerintah Daerah	17
2.2.5 Opini Audit.....	17
2.3 Penelitian Terdahulu.....	18
2.4 Kerangka Pemikiran	24
2.5 Pengembangan Hipotesis.....	25
2.5.1 Pengaruh Usia Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu	25

2.5.2	Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Ketepatan Waktu	26
2.5.3	Pengaruh Lokasi Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu	27
2.5.4	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu	28
2.5.5	Pengaruh Opini Audit Terhadap Ketepatan Waktu	29

III. METODE PENELITIAN

3.1	Populasi dan Sampel	31
3.2	Data Penelitian	31
3.2.1	Jenis dan Sumber Data	31
3.2.2	Metode Pengumpulan Data	31
3.3	Definisi dan Pengukuran Operasional Variabel	32
3.3.1	Variabel Dependen	32
3.3.2	Variabel Independen	32
3.3.2.1	Usia Pemerintah Daerah	33
3.3.2.2	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	33
3.3.2.3	Lokasi Pemerintah Daerah	34
3.3.2.4	Ukuran Pemerintah Daerah	34
3.3.2.5	Opini Audit	35
3.4	Metode Analisis Data	35
3.4.1	Uji Statistik Deskriptif	35
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	36
3.4.2.1	Uj Multikolinearitas	36
3.4.2.2	Uji Autokorelasi	36
3.4.3	Analisis Regresi Logistik	37
3.4.3.1	Menilai Kelayakan Model Regresi (<i>Goodness of Fit</i>)	38
3.4.3.2	Menilai Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit</i>)	39
3.4.3.3	Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>)	39
3.4.4	Pengujian Hipotesis	39

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	41
4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	45
4.1.2.1 Hasil Uji Multikolinearitas	45
4.1.2.2 Hasil Uji Autokorelasi.....	46
4.1.3 Hasil Uji Analisis Regresi Logistik	47
4.1.3.1 Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (<i>Goodness Of Fit</i>)	47
4.1.3.2 Hasil Uji Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit</i>)	48
4.1.3.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>Nagelkerke R Square</i>).....	49
4.1.4 Uji Hipotesis	50
4.2 Pembahasan	52
4.2.1 Pengaruh Usia Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu	53
4.2.2 Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Ketepatan Waktu	55
4.2.3 Pengaruh Lokasi Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu	58
4.2.4 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu	60
4.2.5 Pengaruh Opini Audit Terhadap Ketepatan Waktu	62

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	65
5.2 Keterbatasan Penelitian	67
5.3 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	72
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Persentase LKPD Tepat Waktu.....	4
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Rincian Sampel Penelitian	41
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	46
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	47
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit</i>	48
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Overall Model Fit</i>	49
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Nagelkerke R Square</i>	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik.....	51
Tabel 4.9 Hasil Hipotesis	53

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hasil Statistik Deskriptif
- Lampiran 2. Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 3. Hasil Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit*
- Lampiran 4. Hasil Uji *Overall Model Fit*
- Lampiran 5. Hasil Uji *Nagelkerke R Square*
- Lampiran 6. Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik
- Lampiran 7. Hasil Tabulasi Data

I. PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai laporan keuangan yang dikelolanya. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan suatu keputusan. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 menjelaskan jika laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan serta sebagai media akuntabilitas sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga pemerintah. Bagi masyarakat LKPD dapat menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Setiap laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif salah satunya adalah relevansi. Untuk membuat laporan keuangan dikatakan relevan maka harus mempengaruhi keputusan pengguna untuk mengevaluasi peristiwa, baik pada masa lalu, masa kini maupun masa depan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika memenuhi syarat yakni memiliki nilai umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediksi (*predictive value*), tepat waktu serta lengkap. Jika laporan keuangan pemerintah tidak tepat waktu dalam penyampaiannya, maka peranan dari informasi keuangan yang dihasilkan menjadi usang bagi pihak pengambil keputusan.

Sehingga ketepatan waktu adalah salah satu faktor yang penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Pengumpulan, peringkasan dan penyajian informasi akuntansi harus dilakukan dengan cepat agar tersedianya informasi ditangan pengguna dapat terjamin. Semakin cepat disampaikan laporan keuangan, maka informasi yang terkandung didalamnya akan semakin bermanfaat sehingga para pengguna informasi laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan lebih baik.

Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, LKPD disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, kemudian BPK melakukan pemeriksaan terhadap LKPD sesuai dengan mandat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, diwajibkannya laporan keuangan pemerintah daerah untuk dapat diberikan kepada BPK agar diperiksa selambat-lambatnya dua bulan setelah penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah sejak berakhirnya tahun anggaran agar laporan hasil pemeriksaan diterbitkan sesuai dengan batasan waktu yang ada.

Bila laporan keuangan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu maka kegunaan laporan tersebut akan berkurang. Informasi yang terkandung menjadi tidak relevan jika tidak tepat waktu, selain itu laporan keuangan yang tidak tepat waktu dalam pelaporannya akan meningkatkan risiko terjadinya asimetri informasi dan mengurangi kemampuannya dalam memberikan gambaran mengenai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah sebagai suatu cara untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan

diperlukan untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan, karena laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Mohammad, 2012).

Dalam praktiknya meski sudah terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur batas maksimum pelaporan LKPD, nyatanya tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Pada IHPS Semester I tahun 2016 terungkap bahwa pada hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2015 ditemukan sembilan pemerintah daerah yang belum menyerahkan LKPD, yakni Pemkab Pidie di Aceh, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Labuhan batu, Pemkab Mandailing Natal, Pemkab Nias Utara, Pemkot Sibolga, Pemkot Tanjung balai di Sumatera Utara, Pemkab Rokan Hulu di Riau dan Pemkab Lembata di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada IHPS Semester I tahun 2017 ditemukan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2016 terdapat lima pemerintah daerah yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya yaitu Pemkab Aceh Singkil, Pemkab Aceh Tenggara, Pemkab Pidie, Pemkab Pidie Jaya dan Pemkot Lhokseumawe di wilayah Provinsi Aceh.

Sebagaimana data pada tabel 1.1 berikut dapat terlihat bahwa hanya di tahun 2017 dan 2018 semua pemerintah daerah menyerahkan LKPD ke BPK dengan tepat waktu. Sedangkan pada tahun 2014 hingga 2017 masih terdapat pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan LKPD nya ke BPK. Bahkan ditemukan kembali pada IHPS Semester I Tahun 2020 hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2019 didapatkan hasil bahwa masih ada pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Oleh sebab itu, pemda yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK akan mempengaruhi proses audit dan

mempengaruhi waktu BPK untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan karena tanggal penyerahan laporan keuangan pemda berpengaruh terhadap waktu LHP yang dikeluarkan oleh BPK, sehingga berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Fakta yang dijelaskan sebelumnya menyatakan bahwa masih terdapat pemerintah daerah yang tidak mematuhi undang-undang. Oleh sebab itu, fenomena tersebut menarik untuk diteliti guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

**Tabel 1.1 Persentase Pemerintah Daerah yang
Menyerahkan LKPD Tepat Waktu**

Tahun	Provinsi	Kota	Kabupaten	(%)
2014	34	91	379	94%
2015	34	91	408	98%
2016	34	92	411	99%
2017	34	93	415	100%
2018	34	93	415	100%
2019	34	93	414	99%

Sumber: IHPS BPK Semester I 2020 (www.bpk.go.id)

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Taufik dan Bandi, 2015) yang menguji tentang karakteristik pemerintah daerah (umur pemerintah daerah dan lokasi pemerintah daerah) terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini sampel diperluas dengan penelitian yang dilakukan selama tahun 2015-2019 pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Selain itu pada penelitian ini ditambahkan variabel tingkat kemandirian pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah dan opini audit. Penelitian mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah relatif masih sedikit dikarenakan biasanya penelitian ketepatan waktu dilakukan dengan menggunakan data primer, dengan menggunakan variabel sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Berdasarkan penelitian (Taufik dan Bandi, 2015) menunjukkan bahwa variabel umur administratif pemerintah daerah dan lokasi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, namun bertolak belakang dengan penelitian (Septiana, 2010) yang menyatakan bahwa variabel umur tidak berpengaruh. Menurut (Rachmawi, 2016) tingkat kemandirian pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, berbeda dengan penelitian dari (Okfitasari *et al*, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran pemda dan opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan namun penelitian (Modugu, 2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi audit *delay*. Dari penjelasan beberapa penelitian terdahulu terlihat bahwa pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sehingga penulis kembali tertarik untuk mengkaji kembali penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian karena pada penelitian sebelumnya mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan lebih dominan meneliti pada sektor privat dibandingkan pada sektor publik sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah usia pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apakah tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
3. Apakah lokasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
4. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
5. Apakah opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa usia pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa tingkat kemandirian berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa lokasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

5. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur keilmuan yang menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia serta dapat memberikan kontribusi untuk menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi evaluasi kepada pemerintah daerah dalam hal mempersingkat waktu penyusunan laporan keuangan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh sehingga informasi pelaporan keuangan dapat disajikan dengan tepat waktu dan lebih baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* dalam Pemerintahan Daerah

Prinsip *agency theory* dikemukakan oleh (Jensen dan Meckling, 1976) yang menyatakan bahwa ada hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*). Wujud hubungan keagenan antara *principal* dan *agent* dapat digambarkan seperti hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah (Arifianti *et al*, 2013).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas publik dalam pengelolaan sumber daya. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Masyarakat sebagai *principal* yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan pemerintah sebagai *agent* yang menjalankan kegiatan dan melakukan pengambilan keputusan. Hubungan ini dikarenakan adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat melalui legislatif berupa undang-undang untuk digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk mengenai waktu pelaporan keuangan. Pengaruh *agency theory* terhadap ketepatan waktu pelaporan yaitu saat pemerintah daerah dituntut oleh masyarakat untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang tepat waktu dan melakukan transparansi laporan keuangan agar meningkatkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta mengurangi konflik kepentingan yang terjadi.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan dalam sektor pemerintahan berperan untuk menyajikan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja entitas mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan selama suatu periode akuntansi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan, mengevaluasi kondisi keuangan serta efektivitas dan efisiensi pelaporan, kemudian untuk menilai ketaatan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pemerintahan wajib membuat laporan keuangan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara atau daerah sebagai syarat mendukung akuntabilitas atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Penyusunan LKPD harus berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah serta harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu karakteristik atau ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi pemerintah dalam memenuhi tujuannya, yakni:

1. Relevan

Relevansi menunjukkan informasi yang termuat di dalam laporan keuangan mempengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu maupun saat ini dan dapat memprediksi masa depan. Dengan begitu, informasi dalam laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan tujuan penggunaannya.

Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi yang ada dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa depan berdasarkan hasil pada masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi harus disajikan dengan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi harus disajikan selengkap mungkin yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan tidak ada pengertian yang menyesatkan dan tidak terjadi kesalahan material, data yang disajikan berupa fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi dan diuji.

3. Dapat Dibandingkan

Jika laporan keuangan pada periode sebelumnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya maka

informasi yang termuat dalam laporan keuangan tersebut dapat berguna dan dapat digunakan.

4. Dapat Dipahami

Laporan keuangan harus dapat menyajikan informasi yang dalam dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh sebab itu, diasumsikan pengguna memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah baik pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah guna menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan informasi naik atau turun nya saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Pada laporan operasional dalam laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas serta penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyediakan informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transaksi yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran serta saldo aktif kas pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal yang menyajikan informasi naik dan turun nya ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan adalah rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Cakupan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar.

2.2 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Evaluasi terhadap kualitas laporan keuangan harus memenuhi tiga kriteria utama yaitu ketepatan waktu, keandalan dan komparabilitas (Iyoha, 2012). Penyajian laporan keuangan dengan tepat waktu merupakan aspek yang strategis untuk memperoleh keunggulan kompetitif dalam menunjang keberhasilan entitas, kepercayaan publik, kualitas kinerja dan kredibilitas kualitas informasi akuntansi yang tinggi atas pelaporannya, terutama pada saat kondisi keuangan dan kinerja entitas sektor publik berada di bawah pengawasan untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan tujuan ekonomi (Cohen dan Leventis, 2013). Ketepatan waktu laporan keuangan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat (3) pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk diserahkan kepada BPK agar dilakukannya pemeriksaan laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1) BPK melaksanakan pemeriksaan atas LKPD dengan batasan waktu dua bulan setelah diterima laporan keuangan dari pemerintah, karena tanggal penyerahan

laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap waktu Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK.

Ketepatan waktu laporan keuangan adalah rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan ditutup yaitu pada tanggal 31 Desember hingga tanggal ketika auditor selesai melakukan proses audit yang tercantum di tanggal tandatangan oleh auditor eksternal, yang berarti semakin cepat auditor menandatangani laporan keuangan maka semakin cepat laporan keuangan disampaikan (Jayanti, 2018). Dalam pemerintahan, ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah rentang waktu penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang telah diaudit kepada publik sejak tahun anggaran berakhir. Penggunaan LHP LKPD dalam studi ini menekankan pada penggunaan data yang terpublikasi secara luas, sekaligus untuk mendapatkan ukuran variabel seperti opini audit. Dikarenakan jika menggunakan LKPD *unaudited* informasi mengenai ketepatan waktu belum tersedia, sebab belum terpublikasi sebelum laporan keuangan tersebut di audit.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan saat informasi tersebut tersedia tepat pada waktunya. Tepat waktu berarti informasi harus disampaikan sedini mungkin sebelum kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2014). Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu akan menyebabkan

informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan tersebut kehilangan nilai dan berpengaruh pada kualitas keputusan.

2.2.1 Usia Pemerintah Daerah

Usia pemerintah daerah berarti seberapa lama pemerintah daerah tersebut ada atau seberapa lama dibentuknya suatu pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang. Usia pemerintah daerah juga dapat dikatakan sebagai usia administratif pemerintah daerah yang diperoleh dari tahun dibentuknya pemerintah daerah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Pemerintah daerah yang memiliki usia administratif yang lebih lama maka tentunya semakin lebih berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dibandingkan dengan pemerintah daerah yang belum lama berdiri. Sebab laporan keuangan yang dibuat pada tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan hasil evaluasinya akan ditindaklanjuti untuk memperbaiki penyajian laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya.

2.2.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah menjadi latar belakang terciptanya independensi bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendanaan dan segala aktivitasnya (Hadi, 2010). Tingkat kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2011). Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan daerah yang cukup tinggi untuk membiayai kebutuhan daerahnya berpengaruh terhadap kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Ketika pemerintah daerah memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik maka pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih cepat dan tepat waktu.

2.2.3 Lokasi Pemerintah Daerah

Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan dengan banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sehingga masih terdapat masalah pemerataan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan letak geografis daerah-daerah di Indonesia yang berbeda, banyak daerah yang masih sulit diakses dan sulit dieksplorasi kekayaan daerah nya. Belum meratanya pembangunan juga ditandai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat. Akibat belum meratanya pembangunan tersebut maka aksesibilitas daerah tersebut rendah sehingga sulit untuk memperoleh informasi yang menyebabkan terhambatnya pelaporan keuangan daerah terutama di daerah yang terpencil.

Dalam penelitian (Cohen dan Leventis, 2013) menyebutkan bahwa faktor lokasi pemerintah daerah turut mempengaruhi lambat tidaknya proses audit di daerah. Lokasi daerah yang berada di pusat ekonomi negara seperti Ibukota negara Yunani dengan tingkat pendapatan lokal yang tinggi memiliki tenaga yang lebih terdidik dan terampil di bidang akuntansi dan audit. Konsekuensinya, daerah yang maju memiliki sarana dan prasarana yang mendukung baik infrastruktur dan teknologi dapat mempercepat proses audit di daerah.

Sama halnya dengan di Indonesia, pemerintah daerah di Pulau Jawa dinilai cenderung akan lebih mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan sebab memiliki infrastruktur, aksesibilitas dan kualitas SDM yang lebih maju daripada pulau lainnya di Indonesia. SDM yang berkualitas dapat mendorong adanya pemahaman tentang pengungkapan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga pemerintah daerah di Pulau Jawa dapat mendorong ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan lebih baik.

2.2.4 Ukuran Pemerintah Daerah

Besarnya suatu pemerintah daerah salah satunya dapat dilihat dari berapa jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut, organisasi besar cenderung lebih memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Ukuran pemerintah daerah adalah gambaran ukuran pemerintah daerah yang ditentukan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki daerah tersebut. Kabupaten atau kota dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Suatu entitas yang besar akan memiliki tenaga akunting, sistem informasi akuntansi yang modern dan sistem pengendalian internal yang bagus dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga penyusunan laporan keuangan akan lebih cepat disajikan (Owusu, 2000).

2.2.5 Opini Audit

Opini audit adalah pernyataan profesional atas pemeriksaan tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Opini tersebut menyajikan tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan berdasarkan pada kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh auditor yaitu terdiri dari sebagai berikut:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian
- c. Opini Tidak Wajar
- d. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Jika BPK memberikan opini selain wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar ataupun pernyataan tidak memberikan pendapat kepada pemerintah daerah maka dapat dianggap sebagai sebuah catatan buruk bagi kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1.	Iyoha, F.O	<i>Company Attributes and The Timeliness Of Financial Reporting in Nigeria/ Business Intelligence Journal, Vol. 5(1), 41-49./2012</i>	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa umur perusahaan merupakan atribut utama perusahaan yang mempengaruhi kualitas ketepatan waktu laporan keuangan secara keseluruhan di Nigeria. Ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran firma audit dan akhir tahun keuangan tampaknya tidak memiliki pengaruh yang

			merugikan pada keterlambatan pelaporan keuangan.
2.	Prince Kennedy Modugu, Emmanuel Eragbhe dan Ohiorenuan Jude Ikhatua	<i>Determinants of Audit Delay in Nigerian Companies: Empirical Evidence/ Research Journal of Finance and Accounting. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol 3, No 6/2012</i>	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan audit fees memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay, lokasi anak perusahaan multinasional berpengaruh positif terhadap audit delay sedangkan variabel <i>debt equity ratio</i> , profitabilitas, ukuran kantor audit dan jenis industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay.
3.	Sandra Cohen dan Stergios Leventis	<i>Effects of municipal, auditing and political factors on audit delay/ Accounting Forum. Vol 37. Hal 40-53 Thessalonki: International Hellenic University/2013</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan <i>strong opposition</i> yang kuat, pemilihan ulang, tim akunting internal, lokasi, <i>remarks</i> dan ukuran kotamadya signifikan secara statistik. Semua variabel independen lainnya tidak signifikan. <i>Strong opposition</i> berpengaruh positif, pemilihan ulang berpengaruh negatif, tim akunting internal berpengaruh negatif, lokasi berpengaruh positif, <i>remarks</i> dan ukuran kotamadya signifikan terhadap audit delay. Tingkat kemandirian berpengaruh positif.
4.	U Efobi dan P Okougbo	<i>Timeliness of Financial Reporting in Nigeria/ South African Journal of Accounting Research,</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

		28:1, 65-77/2014	ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sebaliknya, umur perusahaan ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tanda dan signifikansi <i>leverage</i> dan kinerja perusahaan negatif pada 10 dan 5 persen. Jenis audit tidak berpengaruh signifikan karena auditor tidak dapat mengubah ketepatan waktu laporan keuangan tanpa korporasi kliennya. Variabel tata kelola perusahaan memainkan peran pelengkap dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan di perusahaan yang berkinerja lebih baik dan lebih berkembang.
5.	Asmah Abdul Aziz, Fadlizawati Isa dan Mohd Faizal Abu	<i>Audit Report Lags of Federal Statutory Bodies in Malaysia/ 2014 International Conference on Economics, Management and Development</i> . ISBN: 978-1-61804-217-0/2014	Hasil penelitian ini menunjukkan jika terdapat hubungan antara ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas, komentar auditor/opini audit dan audit <i>report lag</i> . Temuan menunjukkan bahwa komentar auditor sangat mempengaruhi audit <i>report lag</i> . Ukuran perusahaan dan profitabilitas menunjukkan hubungan negatif terhadap audit <i>report lag</i> .
6.	Khaldoon Ahmad Al Daoud , Ku Nor Izah Ku Ismail dan Nor Asma Lode	<i>The Timeliness of Financial Reporting among Jordanian Companies: Do</i>	Perusahaan dengan kinerja yang lebih baik lebih cepat dalam menerbitkan laporan

		<i>Company and Board Characteristics, and Audit Opinion Matter?/ Asian Social Science; Vol. 10, No. 13/2014</i>	keuangan mereka daripada perusahaan dengan kinerja yang menurun. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan opini audit WTP merilis laporan keuangan mereka lebih awal daripada perusahaan yang tidak menerima opini bersih. hubungan antara kualifikasi opini audit dan audit <i>report lag</i> antara perusahaan Yordania adalah negatif dan signifikan. Profitabilitas berpengaruh signifikan dan negatif. Selain itu, perusahaan dengan dewan yang lebih kecil melaporkan lebih cepat daripada perusahaan dengan dewan yang lebih besar. Namun demikian, tidak terdapat bukti pengaruh direksi independen dan jenis sektor terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
7.	Corey S. Cagle, Dale L. Flesher dan Annette B. Pridgen	<i>Audit Report Timeliness of United States Local Governments: An Investigation of Entities Exceeding Reporting Dealines/Accountancy Business and the Public Interest/2014</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan, tidak ada bukti bahwa kabar baik atau buruk yang terkait dengan konten laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap saat laporan audit. Sedangkan opini audit secara signifikan berpengaruh dengan ketepatan waktu laporan audit.
8.	Sigit Wahyu	Pengaruh Opini Audit,	Hasil penelitian

	Kartiko, Fitriany dan Sylvia Veronica N.P Siregar	Kualitas Auditor dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Keterlambatan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/ Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara/2015	menunjukkan bahwa opini audit WTP, jenjang pendidikan Strata 2 akuntansi manajer audit, sertifikasi profesional di bidang audit, dan penyelenggaraan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi secara signifikan mampu menekan jangka waktu keterlambatan penerbitan LHP LKPD
9.	Abdul Munief Itsniawan dan Sri Suranta	<i>Audit Report Lag</i> Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia/ Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia/2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 5 variabel yang diuji hanya 2 variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang tersebut adalah pengalaman pemerintah daerah (umur) dan jumlah temuan pemeriksaan. Adapun ukuran, opini audit, dan jumlah entitas dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
10.	Muchamad Ghufroon Taufik dan Bandi	Karakteristik Pemerintah Daerah Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik Inspektorat Daerah dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia/ Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 15, No. 1, Februari/2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah, lokasi pemerintah daerah dan tingkat keahlian auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian LKPD sedangkan masa jabatan kepala daerah, jenis kelamin kepala daerah

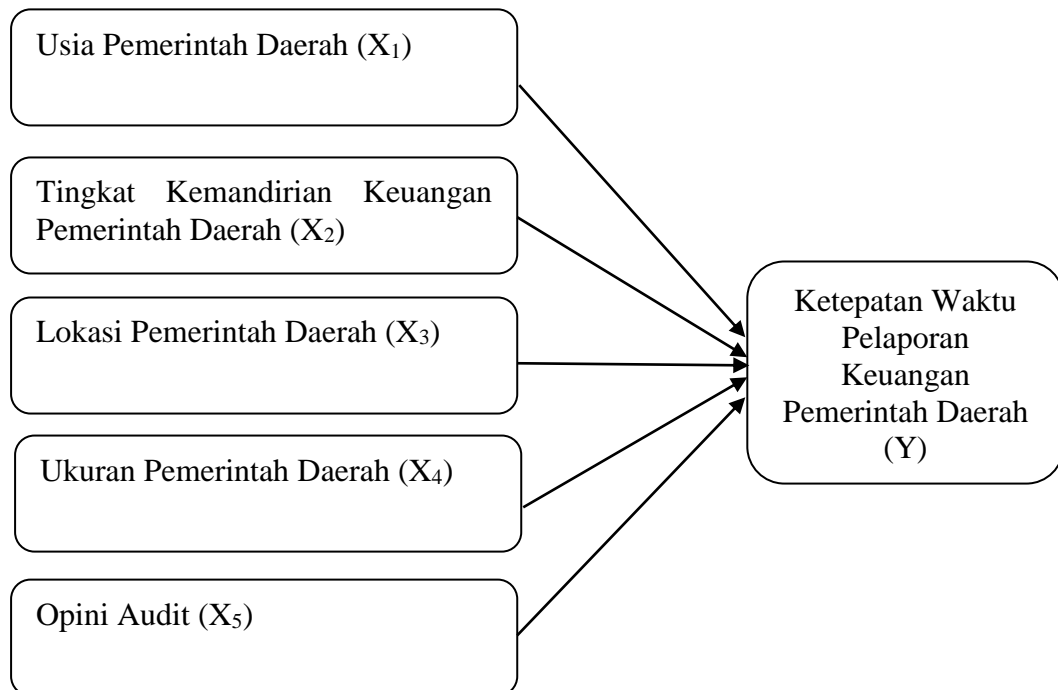
			dan kemampuan inspektorat daerah tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian LKPD.
11.	Sella Rachmawi, Rini dan Yessi Fitri	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia/ Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 9 (1)/2016	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor daerah dan politik yang diproksikan oleh kemandirian, lokasi daerah secara statistik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Faktor kandungan laporan keuangan dan kompetensi manajerial pemerintah daerah yang diproksikan oleh opini audit serta temuan auditor secara statistik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
12.	Bambang Sutopo, Sutaryo dan Yoshia Christian	<i>Empirical study of the determinants on audit reporting timeliness: evidence from Indonesia/Int. J. Trade and Global Markets</i> , Vol. 10, No. 4, 2017/2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya entitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan audit, waktu audit lebih lama untuk pemerintah daerah yang tidak patuh, auditor membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan audit bila ketua tim audit tidak memiliki sertifikasi profesional, dan jumlah temuan audit berpengaruh positif. Kemudian variabel <i>control</i> , jenis pemerintah daerah berpengaruh negatif, lokasi pemerintah daerah berpengaruh positif dan

			signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa waktu audit untuk pemerintah daerah yang berada di pulau Jawa lebih lama dibandingkan dengan waktu audit untuk pemerintah daerah yang berada di luar Jawa. Sedangkan tingkat fungsional auditor internal tidak berpengaruh.
13.	Yuda Saputra dan Nita Erika Ariani	Pengaruh Kompleksitas, Kemandirian dan Opini Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia/ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 3, No. 4/2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas, kemandirian keuangan daerah, dan opini secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu, kompleksitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu dan opini berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pemerintah daerah

2.4 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini menggunakan lima variabel yaitu usia pemerintah daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, lokasi pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah dan opini audit. Secara ringkas, kerangka pemikiran diatas akan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Usia Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu

Usia administrasi pemerintah daerah merupakan tahun dibentuknya suatu pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Menurut (Iyoha, 2012) semakin tua perusahaan, semakin besar kemungkinan mereka memiliki prosedur pengendalian internal yang kuat. Dengan demikian, kelemahan kontrol yang lebih sedikit yang dapat mengurangi keterlambatan pelaporan keuangan. Pemda yang memiliki usia lebih lama memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih baik dalam penyajian laporan keuangannya secara wajar dan sesuai dengan SAP dibandingkan dengan pemda otonomi baru yang belum lama berdiri serta dapat meminimalisir keterlambatan pelaporan keuangan. Semakin lama usia pemda maka semakin banyak pengalaman pemda tersebut sehingga mendorong

pemerintah daerah semakin cepat menjalankan sistem pengelolaan dan penyusunan laporan keuangannya dengan demikian akan semakin tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Owusu, 2000; Taufik dan Bandi, 2015). Yang menyatakan bahwa variabel usia administratif pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemda. Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Usia pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.5.2 Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat. Menurut (Rachmawi, 2016) menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Jika sebuah daerah memiliki tingkat kemandirian yang rendah maka cenderung akan mempunyai kemampuan keuangan daerah yang terbatas (Fachrurozi, 2014). Sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian pemda dalam membiayai sendiri kegiatan daerahnya maka akan semakin tepat waktu dalam pelaporan keuangannya (Saputra dan Ariani, 2018). Pertumbuhan yang positif mendorong adanya kemampuan pemda yang tinggi untuk menunjukkan kemandirian terhadap kemampuan keuangan daerah dalam pengelolaan laporan

keuangannya. Kemandirian pemda berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang baik serta mencerminkan kinerja yang baik untuk pemda, salah satu indikasinya adalah ketepatan waktu. Kemandirian keuangan daerah dapat mendukung kerjasama yang baik antara pemda dalam pelaporan LKPD agar dilakukan pemeriksaan dengan tepat waktu sesuai dengan SAP sehingga pelaporan dapat dilakukan dengan tepat waktu. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawi, 2016; Saputra dan Ariani, 2018). Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.5.3 Pengaruh Lokasi Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu

Jika suatu daerah memiliki aksesibilitas yang rendah akibatnya daerah tersebut akan sulit untuk memperoleh faktor produksi, akses transportasi dan telekomunikasi, serta fasilitas lainnya dalam pengelolaan laporan keuangan. Belum sempurnanya pemerataan pembangunan daerah menjadi faktor terhambatnya pelaporan keuangan daerah terutama pada daerah-daerah terpencil dimana masih kesulitan untuk mengakses informasi ataupun karena minimnya faktor sumber daya manusia yang ada. Menurut (Cohen dan Leventis, 2013) di kotamadya Yunani yang termasuk dalam prefektur Attiki dan Thessaloniki yaitu daerah ibukota memiliki peringkat yang lebih tinggi dalam efisiensi secara keseluruhan. Konsekuensinya, lokasi diharapkan dapat mempengaruhi dan mempercepat proses audit di daerah. Kota-kota yang termasuk daerah ibukota mendapat skor yang lebih baik terkait efisiensi internal operasi dibandingkan

dengan daerah lain. Wilayah pemda di Pulau Jawa cenderung lebih mematuhi SAP karena aksesibilitas yang lebih baik daripada pulau-pulau lainnya di Indonesia. Pemisahan lokasi pemerintah daerah antara Pulau Jawa dan luar Jawa didasarkan pada kecenderungan pemerintah daerah di Pulau Jawa yang lebih maju baik di sektor ekonomi, infrastruktur dan pendidikan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cohen dan Leventis, 2013; Taufik dan Bandi, 2015). Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Lokasi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.5.4 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu

Besarnya suatu ukuran pemerintah daerah dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki total aset yang lebih tinggi maka akan lebih mendapat tekanan dari publik untuk segera menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Dengan kondisi ini, semakin besar suatu entitas maka akan semakin tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangannya. Perusahaan yang lebih besar dipantau lebih dekat oleh investor, serikat pekerja dan badan pengatur dengan demikian menghadapi tekanan eksternal yang lebih besar untuk melakukan pelaporan keuangan (Modugu, 2012). Pemerintah daerah yang memiliki jumlah aset yang besar dituntut untuk mampu menyusun transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dengan tepat waktu.

Dalam konteks organisasi pemerintah, pemda yang memiliki sumber daya yang lebih besar memungkinkan untuk menerapkan tertib administrasi dan pengelolaan

keuangan daerah juga terdapat tekanan untuk lebih transparan dan tepat waktu dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pemda yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan pemda yang memiliki aset yang lebih kecil, dikarenakan pemda yang memiliki sumber daya atau aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi, sistem informasi yang lebih canggih dan juga pengawasan yang lebih baik. Hal ini didukung pada penelitian yang dilakukan oleh (Modugu, 2012; Owusu dan Leventis, 2006) yang menyatakan jika ukuran dapat mempengaruhi ketepatan waktu. Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.5.5 Pengaruh Opini Audit Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu

Jika auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian artinya auditor telah yakin bahwa pemda tersebut telah menyelenggarakan akuntansi secara baik dan benar sehingga tidak diperlukan prosedur tambahan. Opini yang dikeluarkan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah selain opini wajar tanpa pengecualian yaitu wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau tidak memberikan pendapat dapat menjadi tanda catatan yang buruk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Auditor akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemda dan mempertimbangkan serangkaian tambahan prosedur terkait laporan keuangan yang diyakini secara wajar dalam hal material. Penelitian yang dilakukan oleh (Lase dan Sutaryo, 2014) menyatakan variabel opini audit yang dimasukkan dalam model penelitian adalah opini audit tahun sebelumnya. Hal ini

mengasumsikan bahwa LHP yang berisi opini audit tahun sebelumnya menjadi pembanding sekaligus motivasi bagi auditor untuk menyegerakan proses penyelesaian kegiatan pemeriksaan. Semakin baik opini yang diberikan oleh BPK kepada pemda maka akan semakin meningkatkan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya (Saputra dan Ariani, 2018). Dari uraian di atas maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Opini Audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia tahun 2015-2019. Sampelnya adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil adalah semua anggota populasi atau *all available data* yang artinya pengambilan sampel dengan menggunakan seluruh data yang tersedia yang memiliki data dan informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian.

3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data dari penelitian ini adalah data yang bersifat sekunder yaitu data yang digunakan dari pihak lain yang telah dikumpulkan dan diolah menjadi data untuk kepentingan analisis. Sumber data tersebut berupa data yang dapat diakses di internet, penelusuran dokumen atau publikasi informasi. Data yang diperoleh dari LHP LKPD BPK RI tahun 2015-2019 dan sumber lain dari buku maupun internet seperti *website* BPK RI yaitu *www.bpk.go.id*.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Data dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen yang sudah terjadi. Data mengenai studi pustaka diperoleh dari penelitian terdahulu dan didukung oleh literatur lainnya. Data yang berhubungan dengan variabel diperoleh dari laporan keuangan yang

dipublikasikan oleh BPK RI maupun dari sumber-sumber lainnya yang dianggap sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

3.3 Definisi dan Pengukuran Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ketepatan waktu dikur dengan menggunakan variabel dummy, laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu diberi kategori 1 sedangkan 0 bagi yang tidak tepat waktu (kategori 1 untuk tanggal penerbitan LHP BPK yang tepat waktu, sedangkan 0 untuk tanggal penerbitan LHP BPK yang tidak tepat waktu). Penentuan tepat waktu atau tidak tepatnya pelaporan didasarkan pada tanggal laporan keuangannya, dikatakan tepat waktu jika disampaikan kurang dari 150 hari atau kurang dari tanggal 31 Mei sedangkan jika lebih dari 150 hari maka tidak tepat waktu, pengukuran ini dipilih agar mendapatkan informasi berdasarkan tanggal yang tertera dalam laporan auditor sehingga perlu digunakan laporan keuangan yang *audited*. Sebab jika dihitung selama 120 hari sebelum proses pemeriksaan audit oleh BPK, maka tanggal ketepatan waktunya belum terpublikasi. Waktu pelaporan dapat dilihat pada LHP LKPD yang telah diaudit oleh BPK yang dipublikasikan melalui *website* yaitu *www.bpk.go.id*.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel yang lainnya (variabel dependen). Pengaruh yang dapat diberikan variabel independen bisa berupa pengaruh positif atau

negatif terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah sebagai berikut:

3.3.2.1 Usia Pemerintah Daerah

Umur suatu organisasi dapat diartikan seberapa lama organisasi tersebut berlangsung sejak didirikannya pemda tersebut. Organisasi atau pemda yang telah lama berdiri dianggap memiliki kemampuan yang baik dalam mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan dibandingkan dengan yang baru didirikan. Merujuk penelitian yang dilakukan oleh (Taufik dan Bandi, 2015) yang mengukur variabel usia pemda berdasarkan tahun sejak berdirinya pemda sesuai dengan peraturan perundang-undangan pembentukan daerah yang bersangkutan dan variabel usia pemda dinyatakan dalam satuan tahun. Sumber data pengukuran usia pemda digunakan berdasarkan tahun sejak berdirinya pemda berdasarkan UU Pembentukan Pemerintah Daerah. Sehingga dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Usia} = \text{Usia pemda berdasarkan UU pembentukan masing-masing pemda}$$

3.3.2.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut (Putra, 2018) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan nya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar atau kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Data yang berisi PAD serta lainnya dapat diperoleh dari publikasi LHP LKPD yang diakses dari *website* www.bpk.go.id yang berupa laporan perhitungan realisasi APBD tahun anggaran 2015-2019 sehingga dapat dibuat perhitungan rasio kinerja keuangan nya. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah

diukur dengan rasio kemandirian yaitu total pendapatan asli daerah (PAD) dibagi dengan total pendapatan daerah, dirumuskan dengan:

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3.3.2.3 Lokasi Pemerintah Daerah

Lokasi pemerintah daerah didasarkan dengan pola pemerataan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Menurut (Cohen dan Leventis, 2013) lokasi geografis akan memfasilitasi pelaksanaan audit, sehingga mengarah pada waktu penyelesaian audit yang lebih singkat. Berdasarkan penelitian (Taufik dan Bandi, 2015) maka lokasi pemda yang diukur dengan variabel *dummy*, angka 1 untuk pemda yang berada di pulau Jawa dan angka 0 untuk pemda yang berada diluar pulau Jawa. Pemisahan lokasi pemerintah daerah antara pulau Jawa dan diluar pulau Jawa didasarkan pada kecenderungan pemerintah daerah di pulau Jawa yang jauh lebih maju di sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan para birokratnya memiliki tingkat intelektual yang bagus (Cohen dan Leventis, 2013) sehingga mendorong ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3.3.2.4 Ukuran Pemerintah Daerah

Total aset pemerintah daerah menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Menurut (Modugu, 2012) perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya untuk membayar biaya audit yang relatif lebih tinggi untuk dilakukan segera setelah akhir tahun keuangan dan sebaliknya. Pemda yang memiliki total aset lebih besar cenderung

memiliki kontrol internal yang lebih baik dan SDM yang lebih terampil dalam melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Suatu entitas yang besar akan memiliki sistem akuntansi yang modern dan pengendalian intern yang bagus dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga penyusunan laporan keuangan akan lebih cepat disajikan (Owusu, 2000). Sehingga pada penelitian ini variabel ukuran pemerintah daerah diukur dengan total aset. Total aset pemerintah daerah dapat diperoleh dari publikasi LHP LKPD masing-masing pemda diakses dari *website* BPK RI www.bpk.go.id dapat dilihat pada Laporan Posisi Keuangan atau Neraca.

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{Ln Total Aset}$$

3.3.2.5 Opini Audit

Opini audit dapat diukur berdasarkan pendapat yang diberikan oleh auditor yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pada variabel opini audit dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, angka 1 diberikan kepada pemerintah daerah yang menerima opini WTP sedangkan angka 0 untuk pemerintah daerah yang menerima opini selain WTP. Data opini audit atas LKPD diperoleh dari laporan audit dalam LHP LKPD oleh BPK yang dipublikasikan melalui *website* www.bpk.go.id.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki. Analisis ini hanya digunakan untuk

menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Pengukuran yang digunakan pada uji statistik deskriptif ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standar deviasi (Ghozali, 2018).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas dan autokorelasi, sebab menurut (Ghozali, 2018) metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal, hal ini dapat dianalisis dengan regresi logistik karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel independennya.

3.4.2.1 Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel tidak terjadi korelasi. Untuk mengetahui multikolinearitas tersebut maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). kriteria dalam melihat nilai *tolerance* dan VIF yaitu:

1. Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan $VIF > 10$, terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, tidak terjadi multikolinearitas.

3.4.2.2 Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2018) uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi

yang bebas dari autokorelasi. Uji Durbin-Watson adalah cara untuk mendeteksi autokorelasi, dimana model regresi terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin-Watson hitung terletak di daerah yang tidak ada autokorelasi positif dan negatif. Menurut (Sunyoto, 2016) menyatakan bahwa ketentuan uji Durbin-Watson dalam menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis nol adalah sebagai berikut :

1. Bila angka $DW < -2$ berarti terdapat autokorelasi positif.
2. Bila angka $DW -2$ sampai dengan $+2$ berarti tidak terdapat autokorelasi.
3. Bila angka $DW > +2$ berarti terdapat autokorelasi negatif.

3.4.3 Analisis Regresi Logistik

Dikarenakan pada penelitian ini variabel dependen bersifat *dummy* maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik. Metode regresi logistik cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal (*dummy*). Dalam hal ini dapat dianalisis dengan regresi logistik karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel independennya (Ghozali, 2018). Regresi logistik tidak memerlukan uji asumsi klasik seperti asumsi normalitas dan heteroskedastisitas, dikarenakan variabel dependen yang terdapat pada regresi logistik merupakan variabel dikotomi (0 dan 1) sehingga residualnya tidak memerlukan beberapa pengujian tersebut. Alat analisis menggunakan uji regresi logistik dengan bantuan *software* SPSS 26.

Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel usia pemda, tingkat kemandirian keuangan pemda, lokasi pemda, ukuran pemda dan opini audit mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

dimana:

Y	= ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah
α	= konstanta
β	= koefisien variabel independen
X_1	= usia pemerintah daerah
X_2	= tingkat kemandirian pemerintah daerah
X_3	= lokasi pemerintah daerah
X_4	= ukuran pemerintah daerah
X_5	= opini audit yang diberikan oleh BPK atas LKPD
e	= <i>error terms</i> (kesalahan pengganggu)

Menurut (Ghozali, 2018) terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis pengujian dengan menggunakan regresi logistik, yaitu:

1. Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)
2. Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)
3. Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

3.4.3.1 Menilai Kelayakan Model Regresi

Kelayakan ini dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* \leq dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness of Fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Sedangkan jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of*

Fit Test \geq dari 0,05 maka hipotesis nol diterima karena model dikatakan mampu memprediksi nilai observasinya dan cocok dengan data observasinya (Ghozali, 2018).

3.4.3.2 Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Overall Model Fit dilakukan guna melihat apakah data yang digunakan *fit* dengan model yang dihipotesiskan, hal tersebut ditunjukkan dengan angka $-2 \log likelihood$ awal dimana model hanya memasukkan konstanta (*block number* = 0), dengan nilai $-2 \log likelihood$ akhir dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas (*block number* = 1). Jika terjadi penurunan maka berarti data yang digunakan *fit* dengan model yang dihipotesiskan merupakan model regresi yang baik dan layak digunakan (Ghozali, 2018).

3.4.3.3 Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R²*)

Pengujian R^2 digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila R^2 sama dengan 0, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan bila R^2 semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen semakin kecil terhadap variabel dependen. Apabila R^2 semakin besar mendekati 1, hal ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji *Wald* untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan melihat nilai signifikan *significant p-value (probability value)*, jika lebih

besar dari tingkat signifikansi 5% maka hipotesis ditolak atau variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya, jika *significant p-value (probability value)* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% maka hipotesis diterima atau variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Usia pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Semakin tua usia pemerintah daerah maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki sehingga mendorong pemerintah daerah lebih cepat dalam menjalankan sistem pengelolaan keuangan dan semakin menyadari mengenai pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini **terdukung**.
2. Tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar rasio tingkat kemandirian yang dihasilkan maka berarti pembiayaan pembangunan di daerah sebagian besar ditanggung oleh usaha pemda itu sendiri. Sehingga dapat menandakan bahwa pemda tersebut memiliki tingkat kemampuan keuangan yang baik. Pemda yang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tinggi berarti tidak memiliki ketergantungan kepada pihak eksternal karena pemda tersebut memiliki motivasi yang tinggi terhadap kemampuan keuangannya sehingga berpengaruh dalam menyusun laporan keuangan yang tepat waktu. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini **terdukung**.

3. Lokasi pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pemda di pulau Jawa cenderung memiliki akses dan SDM yang berkualitas sehingga mendorong adanya pemahaman tentang pengungkapan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga pemerintah daerah di pulau Jawa memiliki tingkat kepatuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini **terdukung**.
4. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan semakin besar aset suatu pemda, maka pemda mengalami ketidaktepatan waktu lebih tinggi. Semakin besar aset suatu pemerintah daerah, maka akan semakin lambat dalam menyajikan laporan keuangannya. Sebab artinya semakin banyak masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan sumber daya. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini **tidak terdukung**.
5. Opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Semakin baik opini yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah maka akan semakin meningkatkan ketepatan waktu pemda tersebut dalam menyampaikan laporan keuangannya sebab opini WTP merupakan kabar baik yang harus dikabarkan secepat mungkin. Pemda yang memiliki opini WTP menunjukkan bahwa pemda tersebut memiliki kinerja yang baik dibandingkan pemda yang memiliki opini selain WTP, sebab dianggap sebagai sebuah catatan buruk kinerja keuangan pemda yang bersangkutan. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini **terdukung**.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pada pengujian ini variabel usia pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah yang di proksikan dengan total aset seharusnya memiliki hubungan yang berbanding lurus yakni jika usia pemda telah lama berdiri maka total asetnya pun akan semakin besar sehingga berpengaruh terhadap ketepatan waktu, namun dalam penelitian ini hasilnya berbeda atau total aset yang besar tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu. Sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat mengkaji kembali dengan mempertimbangkan komponen aset yang diduga dapat memiliki pengaruh yang sejalan dengan usia pemda.

5.3 Saran

Mengenai saran dari hasil penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memasukkan proksi lain untuk variabel ukuran pemerintah daerah dari kelompok aset yang berbeda, yang diduga dapat memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan usia pemda, seperti menggunakan aset bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Daoud, Khaldoon Ahmad., Ku Nor Izah Ku Ismail., dan Nor Asma Lode. 2014. *The Timeliness of Financial Reporting among Jordanian Companies: Do Company and Board Characteristics, and Audit Opinion Matter*. *Asian Social Science*; Vol. 10, No. 13. 2014.
- Arens, A. A., Elder, R. J dan Beasley, M. S. 2012. *Auditing and Assurance Services* (14th ed.). *Prentice Hall*.
- Arifianti, H., Payamta dan Sutaryo. 2013. *Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, Indonesia.
- Aziz, A. A., F. Isa dan M. F. Abu. 2014. *Audit Report Lags of Federal Statutory Bodies in Malaysia. Recent Advances in Economics, Management and Development*, 73-78.
- Aziz, Asmaul. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur)*. *EKSIS*, 11 (1), hal.86-101.
- Bergh, A dan Karlsson, M. 2010. *Government Size and Growth: Accounting for Economic Freedom and Globalization*. *Public Choice*, 142(1-2), 195–213.
- Cagle, Corey S., Dale L. Flesher dan Annette B. Pridgen. 2014. *Audit Report Timeliness of United States Local Governments: An Investigation of Entities Exceeding Reporting Deadlines*. *Accountancy Business and the Public Interest*.
- Cohen, S dan S. Leventis. 2013. *Effects of Municipal, Auditing and Political Factors on Audit Delay*. *Accounting Forum* , 37 (1): 40–53.
- Efobi, U dan P Okougbo. 2014. *Timeliness of Financial Reporting in Nigeria*, *South African Journal of Accounting Research*, 28:1, 65-77.
- Fachrurrozi, Luthfi. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Diponegoro. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Hadi, Waskito. 2010. *Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh)*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3. No. 1. Januari 2010 Hal. 29- 51.
- Halim, A. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Hanafi, Mamduh M. 2015. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.
- Itsniawan, Abdul Munief dan Sri Suranta. 2015. *Audit Report Lag Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia.
- Iyoha, F.O. 2012. *Company Attributes and The Timeliness of Financial Reporting In Negeria*. *Business Intelligence Journal* , 5 (1): 41-49.
- Jayanti, F. D. 2018. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi, Vol. 14(1), 22-33.
- Jensen, M. C dan Meckling, W. H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.
- Kartiko, Sigit Wahyu., Fitriany., dan Sylvia Veronica N.P Siregar. 2015. *Pengaruh Opini Audit, Kualitas Auditor dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Keterlambatan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara.
- Lase, Y., dan Sutaryo. 2014. *Pengaruh Karakteristik Auditor terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. In Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- McLelland, Andrew J., dan Giroux, G. 2000. *An Empirical Analysis of Auditor Report Timing by Large Municipalities*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19 (3), 263-281.
- Modugu, Kennedy. 2012. *Determinants of Audit Delay in Nigerian Companies*. *Journal of Finance and Accounting*. Vol.3, No.6.
- Mohamad, Marziana., Wan Mohammad Taufik Wan Abdullah and Mohamad Sakarnor Deris. 2012. *Audit Delay in Local Authorities: An Exploratory Study in Kedah, Perak and Kelantan*. *International Conference on Economics, Business Innovation IPEDR*, 38.

- Okfitasari, A., Sundari dan Meikhati, E. 2020. *Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 14-23
- Owusu, Ansah, S. 2000. *Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Markets: Empirical Evidence from the Zimbabwe Stock Exchange*. *Accounting and Business Research* , 30 (3), 241 – 254.
- Owusu Ansah, Stephen dan Leventis, S. 2006. *Timeliness of Corporate Annual Financial Reporting in Greece*. *European Accounting Review* , 15 (2), 273–287.
- Pradono, Ferian Cahyo dan Basukianto. 2015. *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, September 2015, Hal. 188 – 200.
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok. Rajawali Pers.
- Rachmawi, Sella., Rini., dan Yessi Fitri. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 9 (1), April. P ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461- 1190.
- Rondonuwu, Ritno H., Jantje J. Tinangon., dan Novi Budiarto. 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. *Jurnal EMBA*, 3 (4), hal.23-32.
- Rustiarini, N.W., dan N.W.M. Sugiarti. 2013. *Pengaruh Karakteristik Auditor, Opini Audit, Audit Tenure, Pergantian Auditor pada Audit Delay*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 2 (2): 657-675.
- Saputra, Yuda., dan Nita Erika Ariani. 2018. *Pengaruh Kompleksitas, Kemandirian dan Opini Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 3, No. 4, (2018). Halaman 712-724.
- Septriana, I. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan BUMN di Indonesia*. *Jurnal Maksi*, 10 (1): 97-117.
- Setyaningrum, D. dan F. Syafitri. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9 (2): 154-170.
- Suhardjanto, D. dan Yulianingtyas, R. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan*

Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Auditing.Vol.8, No.1, November 2011: 1-94.

Sunyoto, Danang. 2016. *Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)

Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.

Taufik, Muchamad Ghufro dan Bandi. 2015. *Karakteristik Pemerintah Daerah Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik Inspektorat Daerah dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 15, No.1, Februari 2015: 65-73.

Tyler, T. R. 1990. *Why People Obey the Law*. Michigan: Book Crafters